

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat, 2013). Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yaitu mencapai 80% dari penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menarik pajak dari masyarakat (Dumairy, 2007).

Pajak memiliki dua fungsi penting yaitu fungsi penerimaan (Budgeter) dan fungsi mengatur (Reguler). Selain dua fungsi tersebut, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi stabilitas, fungsi redistribusi, serta fungsi demokrasi. Fungsi Budgeter adalah pajak yang berfungsi untuk memasukkan uang ke kas negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi budgetair, adanya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan. Fungsi Reguler adalah fungsi yang mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu (Diana,2013).

Menurut James et al. yang dikutip oleh Gunadi (2005) dalam Santoso (2008), pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi.

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kesadaran wajib pajak, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan, akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya (Suryadi, 2006 dalam Alifa, 2012). Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan, terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terdapat beberapa kriteria

tertentu untuk disebut sebagai wajib pajak patuh. Hal ini dikemukakan dalam pasal 1 di mana dapat disebut wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan untuk membayar pajak di Provinsi Jawa Barat ternyata masih rendah. Dari data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I Jawa Barat, baru 2,45 juta warga dari potensi 66 juta warga di wilayah kantor ini yang memiliki nomor induk wajib pajak. Dari 2,45 juta orang yang memiliki Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP) itu, baru terdapat 486.000 wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hartanya. Bahkan, dari 486.000 wajib pajak itu, hanya 86.000 wajib pajak yang melaporkan SPT dan telah membayar Pajak Penghasilannya (PPh). Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP I Jawa Barat Arif Priyanto mengakui, kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat masih rendah. “Penyebabnya

beragam, minimnya pengetahuan dan kesadaran pentingnya pajak bagi negara,” ujar Arif dalam konferensi pers tentang SPT Tahunan dan Amnesti Pajak di Kantor Kanwil DJP I Jawa Barat, Bandung, Selasa (21/3/2017). Ia mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan upaya untuk meningkatkan jumlah warga yang mempunyai NPWP. Sepanjang 2016, Kanwil DJP I Jawa Barat mendapatkan 257.804 wajib pajak baru yang memiliki NPWP. Kanwil DJP I Jawa Barat mengepalai 16 kantor pajak pratama antara lain di Kota Bandung, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, Ciamis, dan Purwakarta. (www.kompas.com)

Hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. Kemudian, dari jumlah total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk bendahara, joint-operation, perusahaan cabang/lokasi, WP OP yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP Non-Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT. Kemudian, dari jumlah total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk bendahara, joint-operation, perusahaan cabang/lokasi, WP OP

yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP Non-Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT. Jumlah WP Wajib SPT tersebut terdiri atas 1.184.816 WP Badan, 2.054.732 WP OP Non Karyawan, dan 14.920.292 WP OP Karyawan. Sayangnya, dari jumlah 18.159.840 WP Wajib SPT itu, baru 10.945.567 WP yang menyampaikan SPT Tahunan atau 60,27% dari jumlah total WP Wajib SPT. Jumlah WP yang menyampaikan SPT tersebut terdiri atas 676.405 WP Badan, 837.228 WP OP Non Karyawan, dan 9.431.934 WP OP Karyawan. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09%, WP OP Non-Karyawan 40,75%, dan WP Karyawan 63,22%. Yang lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah tersebut hanya 1.172.018 WP Bayar, yang terdiri atas 375.569 WP Badan, 612.881 WP OP Non Karyawan, dan 181.537 WP OP Karyawan. Angka 375.569 WP Badan Bayar atau Non SPT-Nihil jelas sangat kecil jika dibandingkan dengan 3 juta lebih perusahaan yang ada dan beroperasi di Indonesia. Sedangkan jumlah 612.881 WP Bayar OP Non Karyawan dan 181.537 WP Bayar OP Karyawan, jauh sangat tak berarti dibandingkan dengan jumlah total 93 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan. (www.pajak.go.id)

Aktivis anti korupsi sekaligus ekonom Dahnil Anzar menyebut penerimaan pajak di Indonesia sulit ditingkatkan. Menurutnya, penyebabnya karena masih minimnya perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak. Kondisi semakin parah, saat perusahaan wajib pajak terdaftar juga tidak aktif membayar pajak. Padahal,

pembayaran pajak badan cukup signifikan terhadap pemasukan ke kas negara. Dari 20 juta badan perusahaan, baru sekitar 5 juta perusahaan yang terdaftar dan hanya 550 ribu perusahaan yang aktif membayar pajak, ujar dia di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (11/1). Tidak hanya masalah wajib pajak badan, masalah penerimaan pajak juga datang dari wajib pajak individu. Total individu aktif membayar pajak sebesar 3 juta dari 60 juta orang yang harus membayar pajak. Sementara yang terdaftar itu ada 23 juta, sambung dia lagi. Menurut Dahnil, saat ini penting bagi Jokowi mendorong Direktorat Jenderal Pajak memperbaiki data penerimaan pajak. (www.merdeka.com)

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman Akuntansi Pajak yang diteliti oleh Sri Ernawati (2011) dan Lydia (2014).
2. Kualitas Pelayanan yang diteliti oleh Tifani Nurhakim (2015) dan Abdul Rohman (2015).
3. Sanksi Pajak yang diteliti oleh Reni Sri Utami (2013), Abdul Rohman (2015) dan Budiman (2015).
4. Kesadaran Wajib pajak yang diteliti oleh Ketut Evi Susilawati (2013), Lian Ade Saputra (2014), Budiman (2015) dan Vanli Tuwo (2016).

5. Pengetahuan Pajak yang diteliti oleh Ketut Evi Susilawati (2013), Lian Ade Saputra (2014), Anita Damajanti (2014), Istika Herliani Ulfa (2015) dan Aditya Nugroho (2016).

6. Pemahaman Wajib Pajak yang diteliti oleh Siti Masruroh (2013), Tifani Nurhakim (2015) dan Abdul Rohman (2015).

Tabel 1.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan Penelitian Sebelumnya

NO	Peneliti	Tahun	Pemahaman Akuntansi Pajak	Kualitas Pelayanan	Sanksi Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Pengetahu an Pajak	Pemahaman Wajib Pajak
1.	Sri Ernawati	2011	✓	-	-	-	-	-
2.	Siti Masruroh	2013	-	X	X	-	-	✓
3.	Renny Sri Utami	2013	-	-	✓	-	-	-
4.	Ketut Evi Susilawati	2013	-	-	-	✓	✓	-
5.	Lian Ade Saputra	2014	-	-	-	✓	✓	-
6.	Lydia	2014	✓	-	-	-	-	-

7.	Anita Damajanti	2014	-	-	-	-	✓	-
8.	Tifani Nurhakim	2015	-	✓	-	-	-	✓
9.	Abdul Rohman	2015	-	✓	✓	-	-	✓
10.	Budiman	2015	-	-	✓	✓	-	-
11.	Istika Herliani Ulfa	2015	-	-		X	✓	-
12.	Vanli Tuwo	2016	-	-	-	✓	-	-
13.	Aditya Nugroho	2016	-	-	-	X	✓	-

Tanda ✓ = Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tanda X = Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tanda - = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari 2 (dua) penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riano Roy Purnaditya dan Abdul Rohman (2015) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Lydia (2014) yang berjudul Pengaruh Pemahaman

Akuntansi Pajak Dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Riano Roy Purnaditya dan Abdul Rohman (2015), adapun variabel yang diteliti terdiri dari dua, yaitu : Variabel Dependen dan Variabel Independen. Variabel dependennya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, sementara variable independennya yaitu Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak. Untuk lokasi dan tahun data dalam penelitian ini yaitu KPP Pratama Semarang Candisari pada tahun 2015. Unit analisisnya yaitu Perusahaan. Untuk unit observasinya yaitu pelaku usaha yang telah terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Penelitian ini mengambil sampel WP OP yang melakukan kegiatan usaha di wilayah KPP Semarang Candisari. Sebanyak 130 kuesioner disebarkan pada pelaku usaha yang telah terdaftar di KPP Semarang Candisari. Hasil akhir menunjukkan bahwa jumlah kuesioner yang dapat dianalisis sebanyak 114 kuesioner. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Convenience sampling. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sedangkan Lydia (2014), variabel yang diteliti Kepatuhan Perpajakan sebagai variable dependen dan Pemahaman Akuntansi Pajak dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebagai variable independen. Untuk lokasi dan tahun data dalam penelitian ini yaitu KPP Madya Bandung pada tahun 2014. Unit analisisnya yaitu Perusahaan. Untuk unit observasinya yaitu para wajib pajak yang

terdaftar di KPP Madya Bandung. Sampel pada penelitian ini hanya 93 orang dan tidak memenuhi syarat menggunakan *Structural Equation Modelling (SEM)*. Kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan dalam penelitian ini. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan *Stratified Random Sampling*. Hasil penelitian ini adalah Pemahaman Akuntansi Pajak dan Penerapan Sistem Adminitrasi Pepajakan Modern berpengaruh rendah terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya Riano Roy Purnaditya dan Abdul Rohman (2015), variabel yang diteliti terdiri dari dua, yaitu : Variabel Dependen dan Variabel Independen. Variabel dependennya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, sementara variable independennya yaitu Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak, sedangkan Lydia (2014), variabel yang diteliti Kepatuhan Perpajakan sebagai variable dependen dan Pemahaman Akuntansi Pajak dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebagai variable independen. Rencana dalam penelitian ini penulis memilih variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependennya dan Pemahaman Akuntansi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak sebagai variabel independen. Untuk lokasi dan tahun data dalam penelitian yang dilakukan Riano Roy Purnaditya dan Abdul Rohman (2015) yaitu KPP Pratama Semarang Candisari pada tahun 2015 sedangkan penelitian yang dilakukan Lydia (2014) KPP Madya Bandung pada tahun 2014. Rencana dalam

penelitian ini penulis memilih lokasi dan tahun data di KPP Madya Bandung tahun 2017.

Alasan dalam pemilihan variable adalah karena penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tidak memberikan konsistensi yang signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tifani Nurhakim (2015) dan Abdul Rohman (2015) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh (2013) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Reni Sri Utami (2013), Abdul Rohman (2015) dan Budiman (2015) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh (2013) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang diuraikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah yaitu :

1. Masih ada wajib pajak yang belum patuh akan kewajiban untuk membayar pajak.
2. Wajib pajak tidak patuh karena kurangnya kesadaran, kualitas pelayanan yang kurang memuaskan dan pengetahuan akan membayar pajak.
3. Tidak tercapainya target pemerintah dalam hal penerimaan pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pemahaman Akuntansi Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
2. Bagaimana Kualitas Pelayanan Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

3. Bagaimana Sanksi Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
4. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
5. Seberapa besar Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
6. Seberapa besar Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
7. Seberapa besar Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pemahaman Akuntansi Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
2. Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
3. Untuk mengetahui Sanksi Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

4. Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Sanksi Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan terutama tentang pemahaman akuntansi pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

a. Bagi Penulis

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, pengenalan, dan pengamatan mengenai pemahaman akuntansi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
2. Dapat meningkatkan keterampilan serta menyajikan data dan fakta mengenai pemahaman akuntansi pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara jelas dan sistematis.
3. Dapat melatih penulis dalam menggabungkan hasil bacaan mengenai perpajakan dari berbagai sumber, mengambil sarinya, dan mengembangkannya ke tingkat yang lebih matang.
4. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang perpajakan, khususnya wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan Pemahaman

Akuntansi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dapat membantu dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan dan sumber informasi khususnya Pemahaman Akuntansi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung yang bertempat di GKN Gd. G, Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung 40116. Rencana waktu penelitian ini akan dilakukan mulai dari bulan Agustus 2017 sampai Oktober 2017.